

# PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA PROSTITUSI DI JALAN BUNG TOMO, DESA PEMECUTAN KAJA, KOTA DENPASAR

Ni Kadek Trisna Dewi<sup>1)</sup>, Nazrina Zuryani<sup>2)</sup>, I Gst. Ngr. Agung Krisna Aditya<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : [kadektrisnadewi02@gmail.com](mailto:kadektrisnadewi02@gmail.com)<sup>1</sup>, [nazrinazuryani@unud.ac.id](mailto:nazrinazuryani@unud.ac.id)<sup>2</sup>,

[krisnaditya25@unud.ac.id](mailto:krisnaditya25@unud.ac.id)<sup>3</sup>,

## ABSTRACT

*Sociological research analyzing community behavior towards Commercial Sex Workers (CSWs) activities is very minimal. This descriptive-explanatory qualitative research examines the phenomenon of prostitution in the Bung Tomo Street area, Denpasar City. The perspective of an individual as a member of society is explored to answer the phenomenon of prostitution in the research location in Banjar Kusuma Jati, Denpasar City. The Behavior Theory from Lawrence Green is used to dissect predisposing factors, enabling factors, and reinforcing factors. The community residing in Bung Tomo Street has a demographic awareness of the impact of prostitution practices. There are services users as a enabling factors who reside across Bung Tomo Street and some traders who feel benefited. The reinforcing factors on the phenomenon of prostitution in Bung Tomo Street are related to the accepting community. The behavior of the community that is against the phenomenon of prostitution and concerns about the transmission of HIV/AIDS become the reason for community rejection. Therefore, the opposing community then reports to the village apparatus. The community still expects the Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) and Social Service to carry out rehabilitation programs. It is suggested that both customary and official apparatus together with the community in the area of Bung Tomo street increase the education and communication in the area under study. The community can increase literacy related to the dangers of the spread of HIV/AIDS and be more alert on the behaviour of young generation towards CSWs.*

**Keywords:** *Community behavior, prostitution, Bung Tomo street*

## 1. PENDAHULUAN

Fenomena prostitusi merupakan sebuah praktik seksual yang bukan menjadi permasalahan baru dalam masyarakat. Sutrisno (dalam Rachmawati, 2019: 183) menjelaskan bahwa *pro-stituere* berasal dari bahasa latin, yakni seseorang dengan membiarkan diri melakukan persundalan, melakukan zina, maupun hal yang berhubungan dengan percabulan, dimana fenomena ini berkaitan dengan pertukaran antara hubungan seksual dengan uang atau hadiah.

Prostitusi itu sama tuanya dengan peradaban manusia. Tercatat dalam catatan sejarah pada tahun 640 M oleh *Dinasti Tang Ch'iu-T'ang Shu* dan *Hsin T'ang Shu* (dalam Ariana, 2022: 19), melaporkan bahwa di Negara Ho-ling di Jawa terdapat beberapa perempuan pekerja seks, kemudian seseorang yang melakukan hubungan seks dengan wanita tersebut akan menderita setelah berhubungan seks. Maka hal tersebut yang menjadi catatan awal prostitusi dan hubungannya dengan penularan penyakit seksual di zaman jawa kuno.

Para Pekerja Seks Komersial (PSK) sangat berdampak dalam terinfeksi penyakit kelamin maupun penularan penyakit menular seperti HIV/AIDS. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali (dalam [www.diskes.baliprov.go.id](http://www.diskes.baliprov.go.id), 2022), mengatakan jika saat ini Bali termasuk dalam kategori endemic terkonsentrasi, dimana estimasi ODHIV saat ini sebanyak 31.686 jiwa, hingga maret 2022 ditemukan kasus sebanyak 26.519 jiwa. ODHIV yang on ARV hingga bulan maret tahun 2022 sebanyak 10.671 jiwa.

Kecenderungan seseorang tertentu menjadi PSK dipicu oleh beberapa faktor, yakni faktor relasional yang dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan dan faktor struktural terkait dukungan budaya/nilai lokal yang mentolerir pelacuran. Faktor lainnya mencakup rendahnya tingkat pendidikan, sulitnya mencari pekerjaan sehingga faktor penghasilan menjadi PSK lebih mencukupi kebutuhan hidup (Munawaroh, 2010: 69).

Salah satu kawasan prostitusi yang ada di Bali, terletak di Kawasan Jalan Bung Tomo, Desa Pemecutan Kaja, Kota Denpasar. Kawasan Bung Tomo terkenal sebagai tempat prostitusi dengan golongan laki-laki yang menjajakan dirinya sebagai waria. Seperti Zuryani (2022) deskripsikan dalam tulisan prosiding internasional IEOM, bahwa kesulitan lebih banyak dialami transpuan atau waria dalam menjajakan diri. Zuryani, Erviantono, dan Pramestisari (2022: 83), menjelaskan bahwa profesi sebagai waria masih dikesampingkan sebagai konsekuensi dari pelabelan atau stigmatisasi masyarakat.

Namun terdapat juga golongan PSK lainnya yang berasal dari perempuan, yakni disebut sebagai Wanita Tuna Susila (WTS) yang menjajakan dirinya untuk mendapatkan sejumlah uang. Penelitian ini berfokus pada kategori perempuan sebagai pelaku seks dalam fenomena prostitusi di Kawasan Jalan Bung Tomo, Kota Denpasar, Bali.

Menurut Wahyu Satriawan selaku Kepala Kewilayahan Dusun Margajati, mengatakan jika Jalan Bung Tomo terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni terletak di kawasan Banjar Mekar Manis, Banjar Semilajati, dan Banjar Kusuma Jati. Banjar Kusuma Jati merupakan bagian wilayah dari Dusun Margajati dan memegang wilayah Jalan Bung Tomo Utama yang menjadi salah satu titik lokasi para pekerja seks dari kategori perempuan menjajakan dirinya pada malam hari.

Nyoman Gunawan selaku Kelian Adat Banjar Kusuma Jati menjelaskan bahwa rata-rata masyarakat yang menetap di Kawasan Bung Tomo merupakan masyarakat campuran dan berasal dari beragam daerah, sehingga para PSK yang bekerja di kawasan ini rata-rata berasal dari luar Bali khususnya Pulau Jawa. Calon konsumen yang ditargetkan oleh PSK berupa pekerja serabutan seperti buruh bangunan, supir truk, maupun seseorang yang memiliki pendapatan rendah.

Sumber data yang diperoleh dari Yayasan Kerti Praja yang bergerak dalam bidang konseling PSK, bahwa tarif sekali transaksi para PSK antara 30 ribu hingga 50 ribu rupiah (Ascarya, dkk, 2020). Pengakuan salah satu pekerja seks yang beroperasi di

kawasan Bung Tomo, bahwa tarif yang dipasangkan berkisar antara 100 (seratus) ribu hingga 200 (dua ratus) ribu sekali berkencan. Aktivitas prostitusi ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar, sehingga razia kerap dilakukan untuk menjaga ketertiban lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan dari Nyoman Gunawan selaku Kelian Adat Banjar Kusuma Jati, bahwa masyarakatnya yang melaporkan aktivitas PSK didasari dengan ketidaknyamanan akan stigma yang didapat dari masyarakat di luar kawasan, dan juga kekhawatiran akan penyebaran penyakit HIV/AIDS yang dapat mengancam kesehatan masyarakat sekitar. Sehingga dengan begitu sikap masyarakat di kawasan Bung Tomo dikatakan menolak keberadaan PSK. Sementara sebagian penduduk yang merupakan pedagang ataupun pemilik usaha tidak merasa dirugikan dengan keberadaan PSK.

Pihak banjar adat yang menerima laporan dari masyarakat kemudian akan disampaikan kepada pihak yang berwenang seperti Satpol PP dan Dinas Sosial, yang kemudian akan dilakukan razia bersama beberapa pihak yang bersangkutan. Penelitian yang dilakukan oleh Sucita, dkk (2020), menjelaskan jika penegakan sanksi yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Denpasar, yakni berpedoman dalam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 39 dan Pasal 58 ayat (2) Perda Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2015 tentang ketertiban umum, terkait sanksi kurungan paling lama yaitu 6 (enam) bulan dengan maksimal

denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Selain itu Dinas Sosial juga melakukan tindakan untuk menanggulangi praktik prostitusi yang ada di Bali, yaitu Upaya Penal dengan dilakukannya pemberantasan (repersif) suatu kejahatan dan Non Penal dengan dilakukannya pencegahan (preventif) dalam menanggulangi kejahatan. Fenomena prostitusi termasuk dalam kategori Patologi Sosial dalam bidang agama dan moral, profesi sebagai PSK termasuk demoralisasi komersialisasi seks dan bagi pengguna jasa termasuk demoralisasi, sehingga masyarakat memandang sebelah mata martabat seorang pelacur (Ritaudin, 2019: 183). Jika dilihat dari segi sosial. Para perempuan penyedia jasa mengutamakan motif komersial dengan transaksi keuangan. Sedangkan pihak laki-laki hanya mengutamakan penyaluran nafsu seksual.

William Sanger (dalam Usman, 2019: 1) menjelaskan bahwa praktik prostitusi sesungguhnya telah berjalan lama, dan terdapat di setiap ragam peradaban dunia. Sehingga fenomena prostitusi menjadi fakta sejarah yang tidak dapat tertutupi. Maka dari itu stigma buruk akan terus didapatkan oleh para PSK sekalipun telah berhenti dari pekerjaan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam skripsi yang berjudul Perilaku Masyarakat Terhadap Fenomena Prostitusi di Jalan Bung Tomo, Desa Pemecutan Kaja, Kota Denpasar.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian terkait *Perilaku Masyarakat Terhadap Fenomena Prostitusi di Jalan Bung Tomo, Desa Pemecutan Kaja, Kota Denpasar*, penulis melakukan peninjauan kembali terhadap penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penulis menggunakan lima kajian pustaka untuk menggali informasi lebih lanjut. Penelitian pertama dilakukan oleh Siti Nurul Hidayah (2018) dengan judul *Perilaku Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) di Dunia Pelacuran* dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa perilaku sosial PSK di dunia pelacuran terjadi persaingan yang cukup ketat antara sesama pekerja seks. Diketahui jika persaingan dilakukan dengan menggunakan cara dukun dan juga menonjolkan fisik yang dirasa dapat memikat calon pengguna jasa nantinya.

Penelitian kedua dilakukan oleh Bunga Mirance Sibuea (2019) dalam skripsinya yang berjudul *Perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Jaringan Prostitusi Terselubung di Tempat Pariwisata Pantai Pasir Padi Pangkal Pinang*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa fenomena prostitusi banyak dijumpai di kawasan-kawasan pariwisata khususnya di Pantai Pasir Padi sebagai kawasan pariwisata yang diketahui menyediakan fasilitas penginapan. Sehingga fungsi pantai tidak hanya sebagai tujuan wisata, namun menumbuhkan berbagai penyakit sosial hingga penyimpangan sosial dengan adanya praktik prostitusi.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Rian Dwi Putra (2019) dalam skripsinya yang

berjudul *Konstruksi Ruang Pariwisata Seks (Studi Kasus Danau Poso Bali)*. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bagaimana diskonstruksi yang dilakukan pada kawasan Danau Poso dari sebuah makna akan tempat menjadi sebuah ruang. Di mana hal tersebut ditandai dengan adanya pembangunan pelabuhan yang tidak resmi hingga membuka hotel menjadi jaringan pariwisata di kawasan Danau Poso.

Penelitian keempat dilakukan oleh Luh Ratna Tilatama., dkk (2021) dengan judul *Peran Desa Adat Dalung Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung* dengan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu hukum empiris untuk mengkaji permasalahan yang terdapat pada lapangan dan mengkaji bagaimana peran dari Desa Adat Dalung dalam menanggulangi praktik prostitusi terselubung. Hasil penelitian ini mengenai bagaimana peran Desa Adat Dalung dalam menangani praktik prostitusi dengan awig-awig yang dikatakan belum berjalan optimal karena sulitnya mengidentifikasi benar tidaknya terdapat praktik terselubung di beberapa tempat seperti SPA, café, dan salon.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Krista Surbakti dan Permai Yudi (2020) dengan judul *Kajian Mengenai Faktor Penyebab dan Respon Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi di Objek Pariwisata Bukit Lawang* dengan hasil penelitiannya mengenai perempuan yang dijadikan sebagai objek seksualitas, kemudian alasan para PSK meningkat di seluruh dunia dengan berbagai alasan sosial, kultural, maupun ekonomi.

Teori yang penulis gunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni berdasarkan pemikiran Lawrence Green dalam teori Perubahan Perilaku. Dimana perilaku seseorang pada dasarnya merupakan sebuah tindakan atau aktivitas manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang terbentuk sebagai pengetahuan, sikap, ataupun tindakan. Dikatakan bahwa kesehatan tidak hanya tentang kesehatan medis melainkan kesehatan sosial yang diperluas melalui pembahasan aspek-aspek terkait kesehatan masyarakat dan perubahan perilaku masyarakat.

Damayanti (dalam Hamilah, 2022: 13) menjelaskan mengenai kesehatan masyarakat atau individu didasari oleh faktor perilaku (*behavior causes*) dan faktor di luar perilaku (*non behavior causes*). Perilaku seseorang yang dikaji oleh Green Lawrence seseorang dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong.

Pertama yaitu Faktor Predisposisi (*predisposing factors*) Green (dalam Sarwono, 2017: 65), menjelaskan bahwa faktor predisposisi mencakup sikap, pengetahuan individu, tradisi, norma sosial, ataupun unsur-unsur lainnya yang ada dalam diri seseorang atau faktor predisposisi) menjadi faktor yang nantinya dapat memudahkan dan menjadi dasar perubahan tindakan maupun perilaku pada diri individu atau masyarakat.

Kedua, Faktor Pendukung (*enabling factors*) didasari oleh keterampilan baru

yang dimiliki seseorang, masyarakat, atau organisasi tertentu guna membuat suatu perubahan perilaku. Faktor pendukung dapat memungkinkan suatu proses motivasi di realisasikan dan juga sebagai pemungkin untuk terjadinya perilaku tertentu (Pakpahan., dkk, 2021:46).

Ketiga, Faktor Pendorong (*reinforcing factors*) dapat dikatakan sebagai faktor yang memperkuat atas terjadinya perilaku tertentu seseorang. Irwan (2017: 47) menjelaskan bahwa faktor pendorong adalah bentuk hasil dari sebuah tindakan yang menyebabkan apakah perilaku mendapat umpan balik positif dan juga mendapatkan sebuah dukungan secara sosial. Maka dikatakan bahwa Teori Lawrence Green tidak hanya untuk sosiologi kesehatan, bisa juga untuk edukasi, *preventif*, promosi kesehatan, perilaku kesehatan (perilaku) yang didukung dengan adanya sosialisasi seks terkait bahayanya penyebaran HIV/AIDS.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis menggunakan teori perubahan perilaku untuk menjelaskan lebih dalam terkait perilaku masyarakat terhadap fenomena prostitusi di kawasan Bung Tomo, Desa Pemecutan Kaja, Kota Denpasar. Selain itu, penulis juga ingin menganalisis bagaimana fenomena prostitusi masih ajeg hingga saat ini di kawasan tersebut.

### **3. METODELOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian

yang digunakan, yaitu penelitian deskriptif-eksplanatif. Sedangkan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini terletak di kawasan Jalan Bung Tomo Utama yang menjadi bagian dalam Banjar Kusuma Jati, Desa Pemecutan Kaja, Kota Denpasar. Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan Kawasan Jalan Bung Tomo merupakan salah satu kawasan yang cukup terkenal bagi berkumpulnya para Pekerja Seks Komersial (PSK) baik dari golongan wanita maupun waria untuk mencari penghasilan selain kawasan prostitusi lainnya yang ada di Bali.

Kemudian kawasan Bung Tomo juga sedikit diangkat sebagai topik penelitian. Sehingga, menjadikan penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam terkait fenomena prostitusi di kawasan Jalan Bung Tomo. Kemudian menganalisis terkait perilaku masyarakat yang tinggal berdekatan dengan titik lokasi prostitusi dan juga menganalisis penyebab bertahannya prostitusi di kawasan tersebut.

Jenis data yang digunakan berupa penelitian kualitatif. Kemudian penelitian ini menggunakan sumber data yang dibagi menjadi 2 (dua) data, yakni data primer dan data sekunder. Selain itu penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dengan menggunakan tiga informan yang meliputi informan kunci, informan utama, dan informan pelengkap. Untuk teknik dalam penelitian ini meliputi tiga cara, yakni meliputi Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terakhir dalam teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

didasari data dalam model Miles dan Huberman dengan 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Pemecutan Kaja adalah Desa pemekaran dari kelurahan Pemecutan yang terletak pada Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan luas wilayah 3,85 Km<sup>2</sup>. Desa Pemecutan Kaja terdiri dalam 13 Dusun dan 15 Banjar dengan total keseluruhan penduduk mencapai 13,330 jiwa dan total 6.996 keluarga. Kepala Pelaksana Kewilayahan Dusun Margajati, Nyoman Wahyu Satriawan menjelaskan bahwa Dusun Margajati menjadi bagian dari Desa Pemecutan Kaja dan secara adat terbelah menjadi 2 Banjar Adat, yakni Banjar Margajati dan Banjar Kusuma Jati.

Banjar Kusuma Jati merupakan salah satu kawasan Banjar pada Desa Pemecutan Kaja yang menjadi lokasi prostitusi yang terletak pada Jalan Bung Tomo. Kawasan Bung Tomo merupakan pemekaran atau perpindahan lokalisasi dari Lumintang. Kepala Pelaksana Kewilayahan, Nyoman Wahyu Satriawan menjelaskan bahwa prostitusi di Kawasan Bung Tomo ada sejak dibukanya Jalan Bung Tomo dari tahun 1993, dari sebelumnya dimana kawasan tersebut belum terdapat banyak bangunan. Setelah diresmikannya Jalan Bung Tomo menyebabkan banyak masyarakat dari luar

Bali datang dan menetap di kawasan tersebut.

Prostitusi di kawasan Jalan Bung Tomo Utama yang menjadi bagian dari Banjar Adat Kusuma Jati menargetkan tarif berkisar antara 100 ribu hingga 150 ribu rupiah dengan target pasar yakni kepada para pekerja kelas bawah yang bekerja disekitar kawasan Bung Tomo maupun di luar kawasan Bung Tomo. Para PSK yang bekerja biasanya menjajakan dirinya di malam hari dengan berdiam diri diatas motor ataupun berkedok sebagai pedagang, sehingga para PSK dapat dengan mudah mendapatkan calon pengguna jasanya untuk bertransaksi.

#### **4.2 Perilaku Masyarakat di Kawasan Prostitusi Jalan Bung Tomo**

Berjalannya aktivitas prostitusi di Kawasan Jalan Bung Tomo menimbulkan munculnya perilaku masyarakat dalam menanggapi adanya fenomena prostitusi di kawasan yang dekat dengan lingkungan mereka tinggal, khususnya masyarakat pada kawasan Banjar Adat Kusuma Jati. Perilaku yang dilakukan oleh masyarakat pada wilayah yang bedekatan dengan aktivitas prostitusi ini, merupakan sebuah perwujudan dari adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan disekitarnya.

Melalui hasil pengkajian dalam diskusi bersama dengan masyarakat, didapatkan bahwa pemahaman masyarakat banjar adat Kusuma jati terhadap adanya praktik prostitusi di lingkungan yang berdekatan dengan tempat tinggal masyarakat cukup baik. Masyarakat memahami jika adanya

praktik prostitusi menimbulkan dampak dari lingkungan sosial maupun dari segi kesehatan. Sebagian besar masyarakat kontra terhadap adanya praktik prostitusi didasari oleh kesadaran masyarakat akan bahayanya penyebaran penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. Diiketahui terdapat sejumlah wanita yang bekerja sebagai PSK merupakan ODHA yang masih dalam pengawasan pemerintah dan petugas kesehatan dengan diberikan edukasi maupun alat kontrasepsi agar penularan tidak menyebar semakin luas.

Selain karena faktor kesehatan, pemahaman masyarakat terhadap adanya fenomena prostitusi di kawasan Jalan Bung Tomo didasari oleh adanya stigma buruk pada lingkungan sosial masyarakat. Stigma buruk yang dirasakan dikarenakan banyak masyarakat di luar kawasan yang menganggap jika masyarakat di lingkungan yang menjadi lokasi adanya praktik prostitusi ada kaitanya dengan para pelaku prostitusi. Sehingga masyarakat masyarakat yang tinggal berdekatan dengan adanya praktik prostitusi terkena dampaknya, dikarenakan fenomena prostitusi merupakan sebuah patologi sosial dalam masyarakat.

Masyarakat yang tinggal berdampingan dan merasa tidak nyaman dengan adanya praktik prostitusi kemudian akan memberikan laporan kepada aparat desa atau pihak yang bersangkutan menangani hal tersebut, sehingga nantinya akan ditindaklanjuti oleh aparat yang bertugas. Selain itu para PSK terkadang kerap

mendapatkan diskriminasi dalam bentuk verbal yang kerap dilontarkan oleh remaja yang merupakan masyarakat di luar kawasan pada saat para PSK beroperasi di malam hari. Hal tersebut merupakan bukti bahwa fenomena prostitusi sulit diterima oleh masyarakat karena dianggap sebagai penyimpangan sosial dalam masyarakat.

Pihak yang menerima adanya fenomena prostitusi yang merupakan penyedia lokasi berupa penginapan dan juga calon pengguna jasanya yang merasa diuntungkan dengan adanya wanita pekerja seksual untuk ditukarkan dengan sejumlah uang untuk memenuhi nafsu seksualnya. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan mengapa para PSK masih bertahan hingga saat ini dikarenakan adanya pihak yang masih memerlukan jasa PSK dan juga adanya pihak yang melindungi para pekerja seks komersial agar terhindar dari jaringan razia.

#### **4.3 Dampak Aktivitas Prostitusi Bagi Perilaku Masyarakat di Kawasan Jalan Bung Tomo**

Fenomena prostitusi di Kawasan Jalan Bung Tomo menyebabkan adanya dampak yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Adanya kawasan yang menjadi tempat prostitusi tidak menutup kemungkinan akan adanya tindak kriminalitas lainnya di kawasan Jalan Bung Tomo, sehingga masyarakat yang tinggal berdampingan dengan lokasi prostitusi akan terkena dampaknya. Namun dari adanya perilaku masyarakat yang kontra dengan adanya prostitusi menyebabkan terjadinya jaringan

razia di kawasan tersebut. Razia dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang kurang merasa nyaman akan adanya praktik prostitusi, dan juga untuk menciptakan ketertiban umum bagi masyarakat dan lingkungan luas.

Keberadaan PSK di kawasan Jalan Bung Tomo diketahui sudah sedikit berkurang dari beberapa waktu sebelumnya. Hal tersebut didasari alasan selain razia yang pernah dilaksanakan, juga karena sempat mewabahnya virus pandemi Covid-19 yang sempat melanda sehingga menyebabkan para wanita pekerja seks berkurang dengan sendirinya. Meskipun razia kerap dilaksanakan, namun praktik prostitusi sulit dihilangkan 100%. Nyoman Gunawan, selaku Kelian Adat Banjar Kusuma Jati, menjelaskan bahwa razia tidak bisa dilakukan 100% karena mengingat jumlah PSK yang tidak sedikit dan mereka beroperasi secara terselubung,

Selain karena jumlahnya yang banyak, para PSK sulit diberantas juga dikarenakan adanya tuntutan ekonomi dari para pekerja seks yang harus menafkahi keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga. Sehingga menyebabkan para pekerja seks sulit untuk beralih ke pekerjaan lainnya meskipun sudah dihimbau dan diberikan pembinaan oleh Dinas Sosial. Namun terdapat pihak-pihak yang melindungi dan membantu para pekerja seks agar terhindar dari jaringan razia. Seperti halnya perilaku dari pihak yang menerima adanya fenomena prostitusi menyebabkan dampak bagi aktivitas prostitusi masih berjalan hingga kini

di kawasan Jalan Bung Tomo, Desa Pemecutan Kaja, Kota Denpasar.

Pihak yang menerima adanya para PSK seperti penyedia tempat kost atau penginapan. Para pengguna jasa yang mendapatkan keuntungan dari adanya fenomena prostitusi, menyebabkan pihak-pihak tersebut memilih untuk memberikan akses informasi jika akan terjadi jaringan razia dan hal tersebut menjadi alasan mengapa praktik prostitusi sulit untuk dihilangkan secara menyeluruh. Meskipun terdapat pihak yang mendukung dan menolak adanya praktik prostitusi di kawasan Jalan Bung Tomo, Desa Pemecutan Kaja, Kota Denpasar, terdapat pihak netral yakni para pedagang yang melakukan aktivitas berjualan di kawasan tersebut yang hanya fokus berjualan dan tidak merasa dirugikan dengan adanya para PSK yang beroperasi berdampingan dengan aktivitas pedagang yang berjualan di malam hari.

Untuk itu masyarakat dibutuhkan sebagai kontrol sosial agar dapat membantu aparat desa dan pemerintah untuk memberantas praktik prostitusi yang dilakukan secara terselubung, dan proses resosialisasi juga harus tetap dilaksanakan untuk melokalisir dampak buruk yang disebabkan oleh aktivitas prostitusi. Masyarakat dapat membantu pemerintah untuk ikut serta memantau aktivitas prostitusi di wilayah tersebut guna mengantisipasi hal dan yang tidak diinginkan dan dapat melaporkan kepada

pihak terkait jika terdapat hal yang mencurigakan terjadi.

#### **4.4 Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Fenomena Prostitusi Berdasarkan Teori Perubahan Perilaku Oleh Lawrence Green**

Perilaku masyarakat dan masalah kesehatan mengenai adanya fenomena prostitusi di kawasan Bung Tomo dianalisis dalam aspek sosial sosial dan teori perilaku oleh Lawrence Green. Terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat khususnya dalam adanya fenomena prostitusi di kawasan Jalan Bung Tomo, Desa Pemecutan Kaja, Kota Denpasar, yaitu faktor predisposisi (*predisposing factors*), faktor pendukung (*enabling factors*), dan faktor pendorong (*reinforcing factors*).

##### **1. Faktor Predisposisi (*predisposing factors*)**

Faktor ini menjadi faktor internal juga menjadi sebuah pondasi utama bagi individu dalam melakukan suatu hal. Green (dalam Sarwono, 2017: 65), menyatakan bahwa faktor predisposisi menjangkau sikap, kesadaran, pengetahuan seseorang, tradisi, dan nilai-nilai lainnya termasuk nilai sosial. Faktor predisposisi memiliki hubungan dengan motivasi seseorang ataupun kelompok dalam berperilaku, baik mencakup pengetahuan, kepercayaan, persepsi terhadap kemampuan maupun kebutuhan dalam diri, sekaligus sikap seseorang.

Perilaku masyarakat dalam fenomena prostitusi dalam faktor predisposisi menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut merasa kurang nyaman dan menolak adanya PSK di lingkungan mereka tinggal. Berdasarkan pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat yang memandang jika prostitusi merupakan suatu hal yang tidak baik jika dilakukan. Kepercayaan dan keyakinan muncul karena masyarakat percaya dengan adanya fenomena prostitusi yang terus menjamur dan mengakar dapat menyebarkan penyakit menular seksual seperti penyakit kelamin hingga terjangkit virus HIV/AIDS.

Meskipun keberadaan PSK yang sudah berkurang, tidak menutup kemungkinan insiden penularan HIV/AIDS mungkin dapat bertambah apabila para wanita pekerja seks yang beroperasi di kawasan tersebut merupakan ODHIV dan tidak aktif menggunakan alat kontrasepsi ketika berhubungan seks dengan calon pengguna jasanya. Hal tersebut yang menjadi alasan keresahan masyarakat akan adanya penyebaran virus menular seksual karena dapat merusak kesehatan, baik organ reproduksi wanita maupun masyarakat yang bersangkutan jika tidak segera dicegah.

Selain itu dalam kehidupan sosial, masyarakat memandang adanya prostitusi di kawasan tersebut menyebabkan masyarakat menerima stigma buruk dari masyarakat yang tinggal di luar lingkungan Bung Tomo, Kecenderungan tersebut secara tidak langsung menurunkan atau

melabeli masyarakat yang tinggal di kawasan Jalan Bung Tomo memiliki hubungan dengan PSK yang diketahui beroperasi pada kawasan tersebut.

Menyebabkan masyarakat yang merasa kurang nyaman dengan adanya PSK akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang menangani masalah tersebut. Disisi lain dalam perilaku masyarakat yang menerima atau pro dengan adanya prostitusi dapat terlihat dari penyediaan tempat sewa yang diberikan karena adanya kesadaran untuk memanfaatkan lokasi yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan dengan para PSK yang beroperasi di kawasan Jalan Bung Tomo. Kemudian disasari oleh pengguna jasanya yang mengetahui bahaya penularan penyakit seksual, namun tetap menggunakan jasa PSK hanya sebagai hiburan dan penyaluran nafsu semata.

## **2. Faktor Pendukung (*enabling factors*)**

Faktor tersebut terwujud dalam lingkungan fisik, adanya ketersediaan atau tidaknya fasilitas maupun sarana kesehatan. Imama (2020: 105) menyatakan bahwa faktor pendukung menjadi faktor yang memungkinkan terbentuknya sebuah perilaku. Faktor ini didasari oleh keterampilan baru seseorang, organisasi, atau masyarakat untuk membentuk suatu perubahan perilaku. Kebijakan pemerintah khususnya aparat desa pemecutan kaja dan petugas gabungan yang melakukan razia terhadap praktik prostitusi terselubung.

Faktor pendukung meliputi sarana prasarana dan fasilitas, prioritas masyarakat ataupun kebijakan pemerintah dan merupakan sebuah komitmen terhadap kesehatan. Fasilitas yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk para PSK yang terjaring razia ditujukan agar masyarakat tidak terlalu cemas. Sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Sosial sebagai bentuk Upaya menanggulangi adanya praktik prostitusi. Pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial dilakukan satu hari dengan bentuk penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan oleh pembicara dari Dinas Kesehatan dan juga Tokoh Agama guna memberikan edukasi dan pemahaman bagi para pekerja seks akan pentingnya menambah wawasan terkait bahaya penyebaran penyakit dan mempelajari ajaran agama agar tersadar dan dapat memilih jalan yang benar.

Hal tersebut didasari karena penyakit sosial masyarakat ini sulit dihilangkan jika tidak adanya tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau memberantas praktik prostitusi. Selain itu masyarakat juga memiliki motivasi untuk mencari informasi terkait bahaya penularan penyakit seksual dan HIV/AIDS sebagai bentuk edukasi, sehingga masyarakat dapat lebih waspada terhadap diri sendiri maupun keluarga dan lingkungan sekitar agar tidak terjerumus kedalam dunia prostitusi.

### **3. Faktor Pendorong (*reinforcing factors*)**

Faktor ini menjadi faktor yang memperkuat dan mendorong terjadinya perilaku. Faktor yang mendorong perilaku

masyarakat kontra terhadap adanya prostitusi didasari oleh kekhawatiran akan penyebaran penyakit kelamin hingga penularan virus HIV/AIDS. Hal ini didasari karena terdapat sejumlah pekerja seks komersial yang terjangkit HIV/AIDS dan saat ini sedang dalam pengawasan petugas kesehatan untuk menghindari penularan yang semakin pesat.

Kepercayaan yang mendorong perilaku masyarakat muncul karena masih adanya pihak yang masih ingin menggunakan jasa PSK tanpa mempelajari lebih mendalam bahaya dan dampak jangka panjang dari penyakit HIV/AIDS yang dapat menyerang kesehatan dan merusak ketahanan tubuh. Meskipun telah menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom ketika bertransaksi dengan para PSK. Sehingga hal tersebut yang mendorong kepercayaan masyarakat bahwa adanya prostitusi menyebabkan keresahan karena membawa wabah penyakit menular seksual.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan diketahui sebagian calon pengguna jasa yang menggunakan jasa PSK adalah mereka yang merasa kesepian, terdapat masalah hubungan, dan juga sekedar hanya ingin mencari hiburan saja. Meskipun sudah mengetahui resiko dari bahaya penularan penyakit yang mengintainya. Sehingga hal tersebut yang menjadi pendorong yang mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap adanya praktik prostitusi di kawasan Jalan Bung Tomo dan mengakibatkan fenomena

prostitusi hingga saat ini melanggang di kawasan tersebut.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait *Perilaku Masyarakat Terhadap Fenomena Prostitusi di Kawasan Jalan Bung Tomo, Desa Pemecutan Kaja, Kota Denpasar* disimpulkan bahwa sebagian masyarakat di kawasan Banjar Kusuma Jati dan Jalan Bung Tomo Utama dikatakan menolak dan kontra terhadap adanya aktivitas prostitusi karena stigma buruk yang diterima masyarakat dan kekhawatiran yang dimiliki oleh masyarakat akan tertular penyakit HIV/AIDS. Keresahan tersebut menyebabkan masyarakat yang tinggal dekat dengan lingkungan prostitusi melaporkannya kepada aparat desa atau aparat lingkungan yang bertugas menangani hal tersebut.

Kemudian terjadinya penindakan yang dilakukan oleh aparat desa dengan tim gabungan berupa razia dan sosialisasi sebagai bentuk penanggulangan terhadap praktik prostitusi untuk menciptakan ketertiban lingkungan dan pembersihan wilayah Bung Tomo dari adanya aktivitas prostitusi. Namun pemberantasan tidak dapat berjalan 100% efektif dikarenakan terdapat sebagian perilaku masyarakat yang diketahui berasal dari luar kawasan yang menerima dan pro dikarenakan merasa diuntungkan oleh keberadaan PSK akan berusaha melindungi dan memberikan akses informasi kepada para PSK agar terhindar dari jaringan razia.

Sehingga faktor masih berlalu-lalangya para PSK di kawasan Jalan Bung Tomo, didasari atas transaksi ekonomi. Sehingga faktor pendukung dari dinas sosial dalam upaya penal dan non penal. Kemudian selanjutnya akan dilakukan upaya pemantauan dan sosialisasi dari petugas kesehatan kepada para PSK.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### E-BOOK

- Irwan. 2017. *Etika Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: CV. ABSOLUTE MEDIA.
- Pakpahan, dkk. 2021. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rachmawati, W. C. 2019. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Malang: Wineka Media.
- Sarwono, S. 2017. *Sosiologi Kesehatan (Beberapa Konsep Beserta Aplikasinya)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

### SKRIPSI

- Ariana, I. 2022. *Prostitusi Online dalam Yuridis Normatif Perspektif Hukum Pidana Islam: Telaah Kasus di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/PID.SUS/2020PN.PINRANG*. Skripsi. Sulawesi Selatan: Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Hamilah, 2022. *Sikap Dengan Perilaku Masyarakat Tentang Pelaksanaan*

*Vaksinasi Covid-19. Skripsi.*  
Jombang: Institut Teknologi Sains dan Kesehatan.

Putra, R. D. 2019. *Konstruksi Ruang Pariwisata Seks (Studi Kasus Danau Poso Bali). Skripsi.* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sibuea, B. M. 2019. *Perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Jaringan Prostitusi Terselubung di Tempat Pariwisata Pantai Pasir Padi Pangkal Pinang. Skripsi.* Palembang: Universitas Sriwijaya.

## TESIS

Imama. I. (2020). *Implementasi Teori Lawrence Green Pada Aspek Sosial Budaya Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Anemia Ibu Hamil.* (Tesis Magister, Universitas Jember, 2020) Diakses dari <http://repository.unej.ac.id>

## JURNAL

Ascarya, G. A. S., Joni, I D. A. S., & Gelgel, Ni M. R. A. 2020. Pola Komunikasi Antarpribadi Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan Calon Pengguna Jasa di Kawasan Bung Tomo Denpasar. Diakses dalam laman [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/e26b0261d95759482ef96a9a3ac6026f.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/e26b0261d95759482ef96a9a3ac6026f.pdf)

Hidayah, S. N. 2018. Perilaku Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) di Dunia Pelacuran. *Jurnal JTIMAIYA.* 2(1), 111-134.

Munawaroh, S. 2010. Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. *Demensia.* 4(2), 69-82.

Ritaudin, M. S. 2019. Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Aspek Politik Eksistensi Pekerja Seks Komersial (PSK) di Eks Lokalisasi Rawa Laut Panjang Selatan Bandar Lampung. *Jurnal TAPIs.* 15(8), 171-201.

Surbakti. K., & Permai, Y. 2020. Kajian Mengenai Faktor Penyebab dan Respon Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi di Objek Pariwisata Bukit Lawang. *Jurnal Curere.* 4(2), 26-33.

Tilatama, L. R., & Sutrisno, N. K. 2021. Peran Desa Adat Dalung Dalam Penanggulangan Praktek Prostitusi Terselubung. *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA).* 1(1), 284-305.

Usman, A. 2019. Sejarah Prostitusi di Dunia. Diakses dalam laman <https://alif.id/wp-content/uploads/kalins-pdf/singles/Sejarah%20Prostitusi%20di%20Dunia.pdf>

Zuryani, N., Erviantono, T., & Pramestisari, N. A. S. 2022. Penampilan Drag

Queen dalam Pariwisata Urban  
Pink: Komunitas Orang, Tempat,  
dan Kemiskinan. *Jurnal Socius*.  
9(2): 75-84.

## **WEBSITE**

Diskes.baliprov.go.id. 2022. Bali Terbebas  
HIV-AIDS 2030. Diakses pada  
tanggal 8 November 2022 dalam  
laman  
[https://diskes.baliprov.go.id/bali-  
terbebas-hiv-aids-2030/](https://diskes.baliprov.go.id/bali-terbebas-hiv-aids-2030/)

## **ARTIKEL**

Zuryani, N. 2022. Investigating Gender  
Justice to the Minorities: The case of  
Pretty Transpuan in Denpasar, Bali.  
Article. Proceedings of the First  
Australian International Conference  
on Industrial Engineering and  
Operations Management (IEOM).